

  
acc

**EVALUASI PENYELENGGARAAN PROGRAM PENGEMBANGAN  
KEWIRAUSAHAAN TERPADU (PKT) DI SUKU DINAS PARIWISATA DAN  
EKONOMI KREATIF KOTA ADMINISTRASI JAKARTA BARAT**

Nabila Cahya Pramita, Augustin Rina Herawati, Ari Subowo  
Departemen Administrasi Publik  
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Diponegoro  
Jl. Prof. H. Soedarto, SH Tembalang Semarang Kotak Pos 1269  
Telepon (027)7465407 Faksimile (024)7465405  
Laman: <http://www.fisip.undip.ac.id> email [fisip@undip.ac.id](mailto:fisip@undip.ac.id)

**Abstrak:** Permasalahan mengenai kesejahteraan sosial masih banyak terjadi di kota dengan jumlah penduduk besar, salah satunya Provinsi DKI Jakarta. Pemerintah Provinsi DKI Jakarta mendukung upaya masyarakat yang memiliki minat berwirausaha dengan mengeluarkan program Pengembangan Kewirausahaan Terpadu (PKT). Program PKT merupakan program yang tercantum dalam fokus urusan pemerintahan wajib non-pelayanan dasar dalam RPJMD Provinsi DKI Jakarta 2017-2022 yakni menggeser kebijakan ketenagakerjaan dari mencari kerja menjadi terciptanya lapangan pekerjaan atau berwirausaha. Namun, fakta di lapangan menunjukkan bahwa keberjalanan Program PKT khususnya di Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif belum berjalan dengan optimal dibuktikan dengan rekapitulasi capaian peserta yang menunjukkan tidak adanya peningkatan yang signifikan pada tahun 2021-2022. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif dengan teknik pengumpulan data yakni wawancara, observasi, dan dokumentasi. Informan yang dipilih menggunakan metode *purposive sampling*. Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat faktor penghambat dalam penyelenggaraan program, terutama dalam tahapan pelatihan, pendampingan, permodalan, dan pelaporan keuangan.

**Kata Kunci:** Evaluasi, UMKM, Program PKT.

## **PENDAHULUAN**

Penyelenggaraan program-program dan pelayanan publik yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan sosial sangat dibutuhkan oleh masyarakat. Hal ini berbanding lurus dengan apa yang terjadi di lapangan, yang mana kesejahteraan masih menjadi masalah penting yang masih terjadi hingga saat ini (Nurfitriyani, 2014: 564). Permasalahan mengenai kesejahteraan sosial ini masih banyak terjadi di kota-kota yang memiliki jumlah

penduduk banyak, salah satunya Provinsi DKI Jakarta.

Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi DKI Jakarta menunjukkan bahwa total penduduk DKI Jakarta pada tahun 2021 mencapai jumlah 10,56 juta jiwa. Sebagian besar dari masyarakat yang melakukan urbanisasi ke DKI Jakarta menganggap bahwa kota ini menjanjikan dari segi ekonomi (Anggraeni, 2022: 42). Pada akhirnya, kepadatan jumlah penduduk ini berakibat pada kurangnya pengendalian

serta sulitnya masyarakat untuk mencari pekerjaan, sebab tingginya jumlah penduduk tidak diimbangi dengan luasnya lapangan pekerjaan yang tersedia.

Pemerintah terus mendukung upaya-upaya masyarakat yang memiliki ketertarikan dalam berwirausaha untuk menumbuhkembangkan potensi dan kemampuan yang dimiliki. Hal ini sejalan dengan fokus urusan pemerintahan wajib non-pelayanan dasar yang tertera dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi DKI Jakarta 2017-2022 yakni kebijakan ketenagakerjaan diarahkan untuk menggeser paradigma mencari kerja menjadi terciptanya lapangan pekerjaan atau berwirausaha.

Usaha dari Pemerintah Provinsi DKI Jakarta untuk mendorong masyarakat untuk berwirausaha juga tercatat dalam salah satu dari lima misi pembangunan daerah di RPJMD Provinsi DKI Jakarta tahun 2017-2022 pada misi kedua yakni “Menjadikan Jakarta kota yang memajukan kesejahteraan umum melalui terciptanya lapangan kerja, kestabilan dan keterjangkauan kebutuhan pokok, meningkatnya keadilan sosial, percepatan pembangunan infrastruktur, kemudahan investasi dan berbisnis, serta perbaikan pengelolaan tata ruang.”

Salah satu pendorong pertumbuhan ekonomi di Indonesia yakni dari sektor Usaha, Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM). Dalam UU No. 20 tahun 2008 tentang Usaha Mikro Kecil dan Menengah, UMKM dinyatakan sebagai perusahaan kecil yang dimiliki dan dikelola oleh seseorang atau dimiliki oleh sekelompok kecil orang dengan jumlah kekayaan dan pendapatan tertentu. (Mariam & Yuliani 2022: 182).

BPS Provinsi DKI Jakarta menunjukkan hasil SE2016 Listing yakni bahwa jumlah UMKM mencapai lebih dari 1 juta usaha atau 98,78% dari total usaha UMB di DKI Jakarta (Sunaryo et al. 2018: 235). Bahkan, UMKM mampu menyerap tenaga kerja di DKI Jakarta hingga mencapai lebih dari 2,5 juta orang atau sekitar 35,07% dari total tenaga kerja. Hal ini membuktikan bahwa hingga saat ini, UMKM menjadi salah satu penopang terbesar dalam pertumbuhan ekonomi di Provinsi DKI Jakarta.

Dalam merespons kesempatan yang positif ini untuk lebih meningkatkan perekonomian di DKI Jakarta, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta berusaha untuk menciptakan ruang-ruang serta wadah positif bagi masyarakat DKI Jakarta yang memiliki minat untuk berwirausaha, termasuk menjadi wadah baru bagi para pelaku UMKM dengan meluncurkan

Program Pengembangan Kewirausahaan Terpadu (PKT).

Program Pengembangan Kewirausahaan Terpadu (PKT) merupakan salah satu dari Kegiatan Strategis Daerah (KSD) dari Pemerintah Provinsi DKI Jakarta yang berlandaskan pada Peraturan Gubernur No. 2 Tahun 2020. Program PKT yang memiliki nama branding Jakpreneur ini merupakan program lanjutan sekaligus penyempurnaan dari program unggulan Anies dan Sandi yakni One Kecamatan One Center for Entrepreneurship (OK OCE) yang telah terlaksana dari tahun 2018 (Mahmudah, Asari, 2021).

Pergub DKI Jakarta No. 2 Tahun 2020 menunjukkan bahwa salah satu tujuan dari adanya Program PKT adalah menaikkan angka serta kualitas dari pendayagunaan sumber daya dengan memanfaatkan teknologi sehingga bisa menciptakan keunggulan yang bersifat kompetitif dalam rangka memperkuat perekonomian di Provinsi DKI Jakarta. Program ini dilandaskan oleh tujuh tahapan yakni Pendaftaran, Pelatihan, Pendampingan usaha, Perizinan, Pemasaran, Pelaporan Keuangan, dan Permodalan. Dalam melaksanakan tiap tahapan, wirausahawan program didampingi oleh para pendamping PKT (Hendro, Arlinda, 2020: 32). Melalui ketujuh tahapan ini, binaan PKT diharapkan dapat meningkatkan

kemampuan kewirausahaannya melalui rangkaian kegiatan yang dilaksanakan.

Program PKT dilaksanakan secara menyeluruh pada keenam dinas yang telah ditetapkan melalui Pergub DKI Jakarta No. 2 tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Program Pengembangan Kewirausahaan Terpadu. Keenam dinas tersebut diantaranya adalah Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi, Dinas Ketahanan Pangan, Kelautan dan Pertanian, Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi Usaha Kecil dan Menengah, Dinas Pemberdayaan, Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk, Dinas Sosial, serta Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Provinsi DKI Jakarta.

Tabel 1. 1 Rekapitulasi Jumlah Peserta PKT Tiap Tahapan tahun 2021-2022

2021							
Dinas Pengampu	P1	P2	P3	P4	P5	P6	P7
Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi Usaha Kecil dan Menengah	86.742	60.296	71.499	60.070	6.970	2.954	1.788
Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	6.591	4.864	2.419	4.212	605	116	90
Dinas Ketahanan Pangan, Kelautan dan Pertanian	6.761	6.067	4.509	6.087	2.140	2.878	190
Dinas Pemberdayaan, Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk	5.655	4.248	3.348	3.586	1.714	1.449	941
Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	1.554	358	273	576	248	23	16
Dinas Sosial	2.038	1.381	1.187	929	206	265	168

2022							
Dinas Pengampu	P1	P2	P3	P4	P5	P6	P7
Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi Usaha Kecil dan Menengah	34.905	59.302	70.431	75.933	14.228	3.025	1.137
Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	6.484	5.134	1.829	8.789	221	300	44
Dinas Ketahanan Pangan, Kelautan dan Pertanian	6.213	4.345	3.712	9.869	300	1.491	143
Dinas Pemberdayaan, Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk	2.456	2.900	1.396	4,64	1.260	237	98
Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	1.615	3	90	1.211	11	24	4
Dinas Sosial	1.135	481	272	1.398	12	4	109

Sumber Gambar: Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi DKI Jakarta, 2022

Pada tabel 1.3, menunjukkan adanya penurunan signifikan dari jumlah peserta Program PKT di Dinas Parekraf Provinsi DKI Jakarta khususnya pada tahap pelatihan, pendampingan, pemasaran, dan permodalan. Selain itu, jika dibandingkan dengan dinas pengampu lainnya, peserta yang telah memiliki laporan keuangan yang *bankable* di Dinas Parekraf masih sedikit, yakni hanya sebanyak 24 binaan pada tahun 2022, yakni hanya bertambah satu orang dari tahun sebelumnya. Berikut untuk tabel persentase perkembangan dan penurunan dari jumlah peserta Program PKT di Suku Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Provinsi DKI Jakarta:

Tabel 1. 2 Persentase Perkembangan/Penurunan Jumlah Peserta Program PKT Suku

Tahapan Program	2021	2022	Persentase Perkembangan Jumlah Peserta
Pendaftaran (P1)	1.554	1.615	3,90%
Pelatihan (P2)	358	3	-99,20%
Pendampingan (P3)	273	90	-67%
Perizinan (P4)	576	1.211	110,20%
Pemasaran (P5)	248	11	-95,60%
Pelaporan Keuangan (P6)	23	24	4,30%
Permodalan (P7)	16	4	-75%

Sumber: Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi DKI Jakarta, 2022 (data diolah oleh penulis)

Berdasarkan data diatas, diketahui bahwa penurunan yang signifikan terlihat pada tahap pelatihan dengan penurunan 99,2%, pendampingan yakni menurun 67%, pemasaran sebanyak 95,6%, dan permodalan sebanyak 75%. Tabel ini menunjukkan bahwa sebagian besar

tahapan program PKT memiliki penurunan dari segi jumlah peserta.

Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif DKI Jakarta melalui Kepala Bidang Ekonomi Kreatif menegaskan bahwa masih berusaha dalam mendorong pertumbuhan peserta binaannya untuk masuk ke tahapan perizinan (P4) serta pelaporan keuangan (P6). Sebab masih banyak peserta PKT binaannya yang belum tersosialisasi dan memahami terkait pelaporan keuangan. Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif juga masih berusaha untuk mengurus perizinan tiap binaan mulai dari Perusahaan Rumah Tangga serta Nomor Induk Berusaha (NIB) melalui *One Single Submission* (OSS), atau sistem perizinan berusaha yang terintegrasi secara elektronik (Beritajakarta, 2022).

Salah satu suku dinas yang disoroti yakni Suku Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Jakarta Barat. Suku Dinas Parekraf Jakarta Barat merupakan satu-satunya Suku Dinas di Jakarta Barat yang tidak memiliki Kepala Satuan Pelaksana di tiap kecamatannya. Hal ini menjadikan informasi terkait Program PKT kurang maksimal tersampaikan pada masyarakat dan berdampak kepada penyelenggaraan Program PKT (Republika Online, 2022).

Berdasarkan data tersebut, tidak adanya Kepala Satuan Pelaksana di tiap kecamatan pada penyelenggaraan program

PKT di Suku Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Jakarta Barat berpengaruh pada kurang optimalnya penyampaian informasi kepada masyarakat.

Penulis tertarik untuk melakukan penelitian mengenai evaluasi penyelenggaraan program Pengembangan Kewirausahaan Terpadu di Suku Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Dinas Parekraf) Jakarta Barat untuk mengevaluasi apakah program telah berjalan sebagaimana ditetapkan dalam Pergub DKI Jakarta No. 2 Tahun 2020. Penelitian ini membandingkan antara penyelenggaraan program PKT yang saat ini tengah dilakukan oleh Suku Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif dengan ketentuan-ketentuan penyelenggaraan program yang telah ditetapkan dalam Pergub, khususnya pada tahapan pelatihan, pendampingan, permodalan, dan pelaporan keuangan.

## **METODE PENELITIAN**

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif bersifat deskriptif. Teknik pengambilan data yakni wawancara, observasi, dan dokumentasi. Lokasi yang dipilih pada penelitian ini yakni Suku Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Kota Jakarta Barat yang terletak di Jl. Kembangan Selatan, Kecamatan Kembangan, Kota Jakarta Barat. Informan dalam penelitian ini dipilih berdasarkan

metode *purposive sampling*, yakni informan dipilih berdasarkan dengan pertimbangan tertentu yang telah ditetapkan.

Adapun informan dalam penelitian ini yaitu: Kepala Seksi Ekonomi Kreatif Suku Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Kota Jakarta Barat, Pendamping Program PKT, dan UMKM Program PKT binaan Suku Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Jakarta Barat. Pemilihan enam informan UMKM binaan Suku Dinas Parekraf Jakarta Barat dipertimbangkan dari potensi yang dimiliki oleh UMKM tersebut dan juga didasarkan dengan keberagaman jenis usaha yang digeluti.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

Lester dan Stewart (2000) mengungkapkan evaluasi kebijakan merupakan suatu usaha untuk menilai konsekuensi kebijakan yang ditujukan untuk suatu kebijakan berdasarkan dari kriteria serta standar ataupun standar yang telah dibuat. Sedangkan Dunn mengemukakan bahwa evaluasi dapat disamakan dengan penaksiran (*appraisal*), pemberian angka (*rating*), serta penilaian (*assessment*). Terdapat enam kriteria evaluasi menurut Dunn yakni; efektivitas kebijakan, efisiensi pelaksanaan kebijakan, kecukupan terhadap kebutuhan; perataan

dalam pelaksanaan kebijakan; responsivitas; ketepatan program.

Penulis menggunakan teori dari William N. Dunn dalam mengevaluasi program Pengembangan Kewirausahaan Terpadu di Suku Dinas Parekraf Jakarta Barat. Hal ini dikarenakan menurut Dunn, evaluasi berkenaan dengan manfaat dari hasil kebijakan. Yang mana hal ini sesuai dengan tujuan pelaksanaan program PKT yakni sebagai implementasi Pergub DKI Jakarta No. 2 tahun 2020 untuk mendukung terciptanya wirausaha baru di DKI Jakarta.

Teori kedua pada penelitian ini adalah teori Keberhasilan Implementasi Program dari Merilee S. Grindle. Teori tersebut digunakan untuk mengetahui manfaat atau dampak positif yang dihasilkan, seberapa besar perubahan yang ingin dicapai, serta sumber daya yang mendukung implementasi berjalan dengan baik.

Berdasarkan pada Peraturan Gubernur DKI Jakarta Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Pengembangan Kewirausahaan Terpadu pasal (4), sasaran program PKT ditujukan bagi wirausaha pemula. Yang mana wirausahawan pemula sebagaimana dimaksud dapat berupa wirausaha naik kelas dan pencari kerja. Sasaran wirausahawan pemula ini mencakup semua lapisan masyarakat, termasuk diantaranya keluarga miskin

berdasarkan Basis Data Terpadu (BDT) dan penyandang disabilitas.

Upaya dalam menumbuhkembangkan wirausahawan melalui Program PKT ini diwujudkan melalui tujuh tahapan dalam Program PKT yakni pendaftaran, pelatihan, pendampingan usaha, perizinan, pemasaran, pelaporan keuangan, serta permodalan. Pada penelitian ini, tahapan yang dievaluasi yakni tahapan pelatihan, pendampingan, permodalan, dan pelaporan keuangan, sebab tahapan-tahapan inilah yang memiliki penurunan peserta yang cukup signifikan dalam penyelenggaraan Program PKT di Suku Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Kota Jakarta Barat. Selain itu, penelitian ini juga mengevaluasi sarana dan prasarana yang tersedia dalam penyelenggaraan program.

### **Tahap Pelatihan**

Berdasarkan Pergub DKI Jakarta No. 2 tahun 2020, tahapan pemasaran diatur khusus pada Pasal 22, yakni bahwasanya Perangkat Daerah Penyelenggara PKT baik secara mandiri maupun bersama-sama dengan Lembaga dan/atau pihak lainnya memfasilitasi pemasaran produk peserta PKT.

Suku Dinas Parekraf Jakarta Barat hanya mendapatkan anggaran untuk tahapan pelatihan, yakni berupa Bimbingan Teknis di hotel-hotel di daerah Jakarta

Barat. Selain mendapatkan pemateri dan ruangan untuk menyelenggarakan Bimtek, peserta PKT yang mengikuti Bimtek juga mendapatkan makan siang dan sore, *souvenir*, serta *goody bag*.

Namun, Bimtek yang dilakukan dengan bentuk *online* tidak berjalan cukup efektif. Salah satu kendala yang masih banyak dijumpai para peserta PKT adalah sulit dalam memahami materi pada pelatihan. Pemberian materi yang diberikan oleh Suku Dinas Parekraf Jakarta Barat yakni meliputi digital marketing, pengenalan fitur-fitur pada *e-commerce*, fotografi, dan pelaporan keuangan. Materi-materi tersebut dirasakan sulit untuk dipahami oleh peserta PKT yang sebagian besar berusia di atas 40 tahun. Hal ini disebabkan dari perbedaan pemahaman teknologi antara satu peserta dengan peserta PKT lainnya. Pernyataan ini didukung oleh analisis isu aktual yang dilakukan oleh Suku Dinas Parekraf Jakarta Barat, bahwa salah satu dari tiga isu yang paling sering dihadapi dalam pelaksanaan PKT adalah pelaksanaan *webinar/talkshow* yang kurang diminati.

### **Tahap Pendampingan**

Terdapat ketidakseimbangan dari rasio penerima dan kelompok sasaran program dengan pendamping program. Berdasarkan hasil penelitian, diketahui

bahwa ada kesulitan dari pendamping program untuk meninjau peserta ke lapangan. Sebab jumlah pendamping di Suku Dinas Parekraf Jakarta Barat hanya ada satu orang, dan harus memonitor serta mengkoordinasikan seluruh kegiatan kepada peserta PKT yang tersebar di delapan kecamatan di wilayah Jakarta Barat.

Keterbatasan sumber daya manusia yang ada pada Seksi Ekonomi Kreatif di Suku Dinas Parekraf Jakarta Barat khususnya pada jumlah pendamping membuat ketidakefektifan dalam pemantauan peserta PKT. Pernyataan ini didukung dari hasil observasi berupa dokumentasi Seminar Rancangan Aktualisasi Suku Dinas Parekraf Jakarta Barat, yang mana isu aktual yang dihadapi dalam penyelenggaraan PKT salah satunya adalah kurangnya pembinaan langsung. Isu aktual ini menempati urutan kedua, dan hingga saat ini belum ada solusi yang dikeluarkan oleh Suku Dinas Parekraf Jakarta Barat untuk pemecahan isu ini.

Ketepatan jumlah penerima program PKT berdasarkan hasil dari Analisis Isu Aktual Suku Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Jakarta Barat menggunakan metode APKL menunjukkan bahwa keterbatasan sumber daya manusia berpengaruh kepada pembinaan atau

pendampingan yang dirasakan oleh para peserta.

Hal ini bersangkutan dengan ketentuan terkait rasio peserta PKT dan rasio pendamping yang telah diatur dalam Pergub DKI Jakarta No. 2 tahun 2020 Pasal 19, yang mengatur bahwa rasio pelaksanaan pendampingan peserta PKT harus memperhatikan prinsip efektivitas, efisiensi, dan kualitas pendampingan. Kriteria ketepatan menjadi penentu apakah program benar-benar memberi manfaat dan menyelesaikan masalah yang telah dihadapi oleh penerima dan kelompok sasaran program.

### **Tahap Permodalan**

Pada tahapan selanjutnya yang diteliti adalah tahap permodalan. Berdasarkan Pergub DKI Jakarta No. 2 tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Pengembangan Kewirausahaan Terpadu, peserta PKT yang telah memiliki atau belum memiliki izin usaha difasilitasi untuk mendapatkan kemudahan akses permodalan dari perbankan, lembaga, atau pihak lain.

Fasilitas permodalan merupakan tahapan yang sering menjumpai kendala dalam pelaksanaannya dibandingkan dengan keseluruhan tahapan lain program PKT. *BI Checking* menjadi kendala utama dalam menjembatani pemberian fasilitas

permodalan dari Suku Dinas Parekras Jakarta Barat kepada peserta PKT.

Banyak peserta PKT yang tidak lolos dalam *BI Checking*, sebab ada riwayat kredit yang bermasalah, baik dari pemilik UMKM maupun dari keluarga pemilik UMKM tersebut. Selain itu, hasil wawancara dan observasi yang dilakukan juga menunjukkan bahwa peserta PKT belum mengetahui secara lebih lanjut terkait tahapan-tahapan apa saja yang ada pada program PKT, sehingga kebanyakan dari para peserta PKT yang diwawancarai tidak mengetahui bahwa pada program PKT terdapat fasilitas permodalan.

### **Tahap Pelaporan Keuangan**

Hasil penelitian menemukan bahwa sebagian besar para peserta PKT belum memiliki pelaporan keuangan yang terintegrasi dengan aplikasi Siapik. Siapik (Sistem Informasi Aplikasi Pencatatan Informasi Keuangan) merupakan aplikasi catatan keuangan yang diberikan 113 oleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta untuk membantu dan memudahkan para UMKM dalam melakukan pembukuan keuangan usahanya.

Sebagian besar peserta PKT masih mempertahankan penggunaan pelaporan keuangan secara manual sebab kurang memahami pencatatan keuangan melalui aplikasi Siapik. Suku Dinas Parekras

Jakarta Barat telah memberikan pelatihan dan pemahaman untuk pemakaian aplikasi Siapik. Namun, pelaksanaannya di lapangan yakni minimnya peserta PKT yang sungguh-sungguh menggunakan aplikasi Siapik. Hasilnya, pencatatan keuangan para peserta PKT menjadi tidak maksimal karena masih banyaknya bahan baku produk yang lupa dicatat. Para peserta pun tidak memiliki angka yang jelas dan pas untuk patokan untung dan rugi dari produk yang dipasarkan.

Minimnya penggunaan aplikasi Siapik tidak sesuai dengan Pergub DKI Jakarta No. 2 tahun 2020 Pasal 23 Ayat (1) yang secara terang telah mengatur bahwa adanya fasilitas yang diberikan oleh pemerintah untuk memudahkan para UMKM dan peserta PKT untuk kemudahan menyusun laporan berbasis aplikasi.

### **Ketersediaan Fasilitas Sarana dan Prasarana**

Penyediaan fasilitas berupa sarana dan prasarana kewirausahaan telah diatur dalam Pergub No. 2 tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Pengembangan Kewirausahaan Terpadu ayat (2) yang berisikan bahwa Perangkat Daerah Penyelenggara PKT dapat menyediakan fasilitas sarana dan prasarana bagi Peserta PKT berupa pemberian bantuan alat kerja

atau sarana lainnya sebagai pendukung peserta PKT mengembangkan usahanya.

Fasilitas sarana dan prasarana yang diberikan oleh Suku Dinas Parekraf Jakarta Barat yakni adalah media pemasaran melalui bazaar dan pameran serta pelatihan yang berupa Bimbingan Teknis (Bimtek). Penyediaan prasarana berupa Bimtek telah tersedia dengan baik sebab adanya anggaran yang dikeluarkan khusus untuk mengadakan Bimtek di Suku Dinas Parekraf Jakarta Barat.

Ketersediaan fasilitas dokumen perizinan juga tertera pada Pergub DKI Jakarta No. 2 tahun 2020 yang tertulis bahwa peserta PKT difasilitasi mendapatkan dokumen perizinan terkait usahanya. Dijelaskan kembali pada Pasal yang sama ayat (3) yang berbunyi “Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi DKI Jakarta memprioritaskan proses dokumen perizinan dan/atau nonperizinan terkait kewirausahaan bagi Peserta PKT”. Sebagian besar para peserta PKT telah merasa terbantu dalam pengurusan dokumen perizinan oleh Suku Dinas Parekraf Jakarta Barat, meskipun dalam hal pengurusan dokumen perizinan masih membutuhkan waktu yang lama.

Namun, kurang cukupnya sarana dan prasarana yang memadai justru dirasakan

oleh Suku Dinas Parekras Jakarta Barat itu sendiri. Tidak adanya anggaran atau alat transportasi yang diberikan oleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta membuat Seksi Ekonomi Kreatif beserta pendamping program PKT mengeluarkan biaya dari dana pribadi untuk transportasi ke lapangan dengan tujuan untuk memonitor langsung keberjalanan UMKM para peserta PKT yang tersebar di delapan kecamatan yang berbeda di wilayah Jakarta Barat.

## **KESIMPULAN**

Dengan keterbatasan berupa anggaran dan sumber daya manusia, Suku Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Kota Jakarta Barat telah terlaksana dengan baik meski belum sepenuhnya optimal karena ada beberapa tahapan yang perlu diperhatikan.

Perizinan dan pemasaran merupakan tahapan yang sangat dirasakan manfaatnya bagi peserta PKT. Perizinan yang diberikan yakni kemudahan pengurusan legalitas HAKI, PIRT, Halal MUI, serta Nomor Induk Berusaha (NIB). Bazaar dan pameran merupakan bentuk pemasaran paling efektif yang diadakan oleh pemerintah. Manfaat program telah tepat sasaran dalam memberikan peserta PKT ilmu dan wawasan terkait kewirausahaan melalui pelatihan, membangun relasi dari program

kolaborasi yang diadakan, serta kemudahan perizinan usaha.

Tahap pelatihan telah diwujudkan melalui Bimbingan Teknis (Bimtek) dengan beragam fasilitas dan topik kelas. Peserta yang mendapatkan pelatihan masih terhitung sedikit sebab mayoritas peserta kurang berminat untuk mendaftar pelatihan berbasis *online* karena kurangnya pemahaman teknologi. Sebagian besar peserta PKT belum memiliki pelaporan keuangan yang terintegrasi dengan aplikasi Siapik.

Ketidakeimbangan rasio penerima dan kelompok sasaran program dengan pendamping program juga menyebabkan pendamping program kesulitan dalam meninjau peserta ke lapangan dan kurangnya pembinaan langsung kepada masyarakat. Kesulitan dalam meninjau peserta juga didukung oleh adanya keterbatasan anggaran dan fasilitas bagi pendamping, dalam hal ini yakni keterbatasan transportasi yang disediakan.

## **SARAN**

1. Pengenalan dasar teknologi yang lebih masif perlu dilakukan melalui pengenalan penggunaan E-mail, Zoom Meeting, serta Google Form.
2. Perlu adanya kajian ulang terkait pemberian alat kerja bagi para peserta PKT khususnya wirausaha pemula

- berstatus keluarga miskin berdasarkan Basis Data Terpadu.
3. Perlu adanya pertimbangan porsi dalam pelatihan seperti 70% praktek dan 30% teori agar peserta tertarik mengikuti pelatihan-pelatihan yang diadakan.
  4. Peningkatan penggunaan aplikasi Siapik dengan menjadikan penggunaan aplikasi sebagai syarat bagi para UMKM untuk dapat mengikuti bazaar, sehingga para peserta bisa mengikuti bazaar apabila telah memiliki pencatatan uang yang *bankable* melalui aplikasi Siapik.
  5. Membagi para peserta yang memiliki minat dan kesamaan kondisi usaha (berkembang/potensi baik) ke dalam beberapa *batch*, sehingga pemantauan serta koordinasi dapat terbentuk lebih optimal.

#### DAFTAR PUSTAKA

- Affrian, Reno. 2020. 53 *Journal of Chemical Information and Modeling* "Model – Model Evaluasi Kebijakan Publik."
- Akib, Haedar, and Antonius Tarigan. 2008. "Artikulasi Konsep Implementasi Kebijakan: Perspektif, Model Dan Kriteria Pengukurannya." *Jurnal* 1(8): 1–19.
- Anggraeni, Firda Auliyah. 2022. "Analisis Faktor Yang Mempengaruhi Peningkatan Urbanisasi Di Kota Jakarta Dan Surabaya Pada Tahun 2020-2021." *Jurnal Ekonomi Bisnis dan Akuntansi* 2(2): 41–53.
- Arikunto, Suharsimi. (2011). *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktik*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Aslinda & Ibrahim, M. Akmal. (2018). *Model Kebijakan Publik dan Teori Perubahan Kebijakan*. Yogyakarta: K-Media.
- Baladika, Adam. 2012. "Evaluasi Program Keluarga Berencana Di Kecamatan Kramatwatu." : 31.
- Grindle, M. S. (1980). *Politics and Policy Implementation in the Third World*. New Jersey: Princeton University Press.
- Hendro, J, and S Arlinda. 2020. "Pengaruh Program Pengembangan Kewirausahaan Terpadu (Jak Prenenur) Terhadap Omset Penjualan UMKM Di Masa Pandemi Covid 19 Di Wilayah Kecamatan Grogol Petamburan Jakarta Barat." *Jurnal STEI Ekonomi* 29(2): 31–43. <https://ejournal.stei.ac.id/index.php/JEMI/article/view/312>.
- Lejiu, Agustinus, Masjaya, and Bambang Irawan. 2017. "Evaluasi Kebijakan Pembangunan Transmigrasi Di Kabupaten Mahakam Ulu (Studi Pada Kecamatan Long Hubung Kabupaten Mahakam Ulu)." : 515–26.
- Lester, James P. & Stewart Jr., Joseph. 2000. *Public Policy: An Evolutionary Approach*. Belmont: Wadsworth
- Mahmudah, Siti, and Muhamad Asari. 2021. "Usaha Mikro Kecil Dan Menengah JAKPRENEUR Meningkatkan Kelas Melalui Kepuasan Pelanggan." *Jurnal Pengembangan Wiraswasta* 23(2): 125.
- Mariam, Siti, and Findy Yuliani. 2022. "Faktor – Faktor Yang Mempengaruhi Pendapatan Umkm Di Kecamatan Tanjung Priok Jakarta Utara (Studi Kasus Binaan Jakpreneur)." *Jurnal Lentera Bisnis* 11(2): 181.

- Moleong, L. J. (2017). *Metodologi Penelitian Kualitatif* (36th ed.). PT Remaja Rosdakarya.
- Nugroho, Riant. 2011. *Public Policy: Dinamika Kebijakan, Analisis Kebijakan, Manajemen Kebijakan*. Jakarta: PT. Elex Media Komputindo.
- Nurfitriyani, Dkk. 2014. "Pelayanan Publik Dalam Upaya Meningkatkan Kesejahteraan Sosial." *Jurnal Administrasi Publik (JAP)* 2(3): 564–70.
- Peraturan Gubernur Nomor 151 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif.
- Peraturan Gubernur Nomor 2 tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Pengembangan Kewirausahaan Terpadu.
- Priadi, Martha Purnama. 2018. "Implementasi Human Capital Pada PT. Telkom Indonesia Kantor Wilayah Usaha Telekomunikasi Bandung." Universitas Pasundan.
- Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi DKI Jakarta 2017-2022.
- Rohman, Arip. 2011. 53 Tesis "Pengelolaan Sekolah Berbasis Religi Studi Situs Madrasah Aliyyah Futuhiyyah – 1 Mranggen Demak." [http://eprints.ums.ac.id/12946/4/BAB\\_III.pdf](http://eprints.ums.ac.id/12946/4/BAB_III.pdf).
- Sangadji, Kapraja. 2014. "MODEL CIPP UNTUK EVALUASI PENGEMBANGAN KTSP PADA JENJANG PENDIDIKAN PERSEKOLAHAN (Sebuah Kajian Teoritik )." *Biosel: Biology Science and Education* 3(1): 79.
- Santy, Nengah Wahyu Diana. 2021. Skripsi STT Kedirgantaraan Yogyakarta "Analisis Penanganan Bagasi Terhadap Kepuasan Penumpang Maskapai Garuda Indonesia Pt. Gapura Angkasa Di Yogyakarta International Airport."
- Sesaria, Monic. 2020. Repositori STIE Indonesia (STIE) Jakarta "Pengaruh Lingkungan Kerja, Pengembangan Karir Dan K3 (Keselamatan Dan Kesehatan Kerja) Terhadap Kepuasan Kerja Pada Pt. Dynaplast Cibitung (DP04)."
- Siyoto, S., & Sodik, A. (2015). *Dasar Metodologi Penelitian*. Literasi Media Publishing.
- Sopannah, Chairul anam, Niken Paramita. 2021. "Peran Penting Pelatihan Digital Marketing Dan." (*Ciastech*): 939–44.
- Subarsono, A. (2005). *Analisis Kebijakan Publik Konsep, Teori, dan Aplikasi*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Sugiyono. (2019). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D* (2nd ed.). CV. Alfabeta
- Sunaryo, K, R Gantino, Y Rova, and N Prayoga. 2018. "Upaya Peningkatan Kinerja UMKM Dan Koperasi Provinsi DKI Jakarta Dengan Adanya PP NO. 23 Tahun 2018." *Jurnal Abdimas* (23). <https://digilib.esaunggul.ac.id/public/UEU-Journal-17948-2786-5401-1-SM.Image.Marked.pdf>.
- Triyono, S. Joko. (2019). *Evaluasi Kebijakan Publik: Kajian Teoritis dan Praktis*. Yogyakarta: Kepel Press.
- Winarno, Budi. 2012. *Kebijakan Publik: Teori, Proses dan Studi Kasus*. Jakarta: Buku Seru
- Yunianto, Angga Dimas. 2018. "Konstruksi Identitas Juru Kunci Kampung Adat Cikondang (Studi Deskriptif Mengenai Konstruksi Identitas Juru Kunci Kampung Adat Cikondang)." : 12–65.